

Implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur

Tri Hadi Wahyono^{1*}, Panji Hendrarso², Joko S Dwi Harjo³

^{1, 2, 3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

²panjihendrarso@yahoo.com, ³trihadiwahyono@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 18, 2025

Revised : April 2, 2025

Accepted : April 12, 2025

Keywords:

Policy Implementation;
Environmental Fire Resilience
System;
Fire Prevention.



Copyright (c) 2025
Abiwara : Jurnal Vokasi
Administrasi Bisnis

ABSTRACT

In 2023, East Jakarta recorded the highest number of fire incidents in Jakarta, with 594 cases, of which Cakung District accounted for 126. However, the implementation of the Fire Resilience System in Cakung remains suboptimal, as Fire Volunteer Units have only been established in some community units (RW) across four out of the seven sub-districts. This study aims to analyze and evaluate the implementation of the Fire Resilience System Policy in early fire prevention at the Fire and Rescue Sub-Department of East Jakarta Administrative City. A qualitative approach was employed, with data collected through interviews involving seven informants. The findings indicate that the implementation of the Fire Resilience System Policy at the Fire and Rescue Sub-Department of East Jakarta has been effective and has yielded positive results. However, several challenges persist, including limitations in human resources, fire prevention facilities, inter-agency coordination, public awareness, and budget constraints. To address these challenges, efforts have been made to strengthen human resources through continuous training, improve fire prevention facilities, optimize inter-agency coordination, enhance public awareness and participation, utilize technology for monitoring and early warning systems, and increase collaboration with the private sector and non-governmental organizations.

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di perkotaan, terutama di kota besar, dengan dampak signifikan terhadap kerugian materi dan keselamatan jiwa. Menurut BNPB (Ruswandi, 2023), “bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, atau manusia.” Salah satu faktor penyebab kebakaran menurut (Fauzia, Lestari, & Wardani, 2022), “kepadatan penduduk yang tinggi dan bangunan yang padat meningkatkan kerentanan terhadap ledakan kebakaran. Kerentanan lingkungan hidup menjadi faktor penting yang memicu terjadinya kebakaran, terutama di daerah padat penduduk. Hal ini diperburuk oleh kelalaian manusia, penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar, serta kualitas bangunan yang tidak memadai. Kombinasi faktor tersebut, ditambah dengan keterbatasan akses kendaraan pemadam kebakaran, secara signifikan meningkatkan risiko dan penyebaran kebakaran dengan cepat di wilayah tersebut.”

Selain itu, (Liao, et al., 2024) juga menambahkan “kondisi kehidupan dengan kepadatan tinggi dapat mempercepat penyebaran api dan membatasi rute pelarian.” Di daerah padat penduduk, “risiko kebakaran meningkat akibat jalan yang sempit, rumah-rumah yang saling berdekatan, dan penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar. Hal ini memfasilitasi penyebaran api serta mempersulit evakuasi dan upaya pemadaman kebakaran. Di permukiman informal, kepadatan penduduk turut berkontribusi terhadap wabah kebakaran, terutama akibat kecerobohan, kurangnya pengetahuan tentang manajemen kebakaran, dan tingginya kesalahan listrik yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai. Faktor-faktor tersebut semakin memperburuk risiko insiden kebakaran di wilayah tersebut.” (Ruswandi, 2023)

Menurut *National Fire Protection Association (NFPA)*, “lebih dari 50% kawasan perkotaan diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk secara signifikan dari tahun 2008 hingga 2030. Peningkatan ini didominasi oleh kawasan permukiman yang padat, dengan unit rumah berukuran kecil dan tipe semi permanen berukuran mulai dari 5m² hingga 21m² yang dihuni oleh 3 hingga 6 orang.

Hunian seperti ini sering kali tidak memenuhi standar minimum hunian keluarga” (Rahmat, Prianto, & Sasongko, 2019). Data *NFPA* menunjukkan bahwa “dampak kebakaran di kawasan perumahan menengah ke bawah, terutama di daerah padat penduduk” (Rahmat, Prianto, & Sasongko, 2019). Peningkatan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya potensi risiko kebakaran.

Tingginya kepadatan penduduk di DKI Jakarta, terutama di Jakarta Pusat (23.249 jiwa/km²), Jakarta Barat (20.717 jiwa/km²), dan Jakarta Timur (16.401 jiwa/km²), meningkatkan potensi bahaya kebakaran di kawasan perumahan. Meskipun Jakarta Timur berada di peringkat ketiga dari enam wilayah administrasi, wilayah ini memiliki risiko kebakaran yang tinggi akibat berbagai faktor. Pemerintah pusat, daerah, dan kota terus berupaya dalam penanggulangan serta pencegahan kebakaran guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Berdasarkan laporan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta tahun 2023, beberapa faktor penyebab kebakaran telah teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1 Penyebab Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2023

Penyebab Kebakaran	Jumlah Kejadian
Listrik	1,216
Membakar Sampah	337
Gas	205
Rokok	130
Lilin	1
Lainnya	397
Total	2,286

Sumber: <https://pemadam.jakarta.go.id>

Berdasarkan tabel, korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran dengan 1.216 kejadian, diikuti oleh pembakaran sampah (337 kejadian) dan penggunaan gas yang tidak sesuai standar (205 kejadian). Instalasi listrik yang tidak aman meningkatkan risiko kebakaran karena banyak masyarakat tidak mematuhi standar keselamatan. Dalam tiga tahun terakhir, kebakaran di DKI Jakarta tetap menjadi masalah serius akibat tingginya angka kejadian yang terus berulang. Berdasarkan laporan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, berikut adalah tabulasi data kebakaran di wilayah DKI Jakarta selama tahun 2021–2023:

Tabel 2 Jumlah Kebakaran di Provinsi DKI

Kota/Kabupaten	2021	2022	2023
Jakarta Utara	210	234	379
Jakarta Selatan	446	457	573
Jakarta Barat	322	331	484
Jakarta Timur	331	340	594
Jakarta Pusat	210	192	256
Kepulauan Seribu	16	18	25
Total	1,535	1,572	2.611

Sumber: <https://pemadam.jakarta.go.id>, 2024

Jakarta Timur pada tahun 2023 mencatat jumlah kebakaran tertinggi di antara seluruh wilayah Jakarta dengan 594 kejadian, diikuti oleh Jakarta Selatan (573 kejadian), Jakarta Barat (484 kejadian), Jakarta Utara (379 kejadian), dan Jakarta Pusat (256 kejadian). Tingginya angka kebakaran di Jakarta Timur mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah ini belum optimal. Jika melihat data per kecamatan di Kota Jakarta Timur selama tahun 2023, Cakung menjadi kecamatan dengan jumlah kebakaran tertinggi, yakni 126 kejadian. Berikut adalah rincian jumlah kebakaran di setiap kecamatan di Jakarta Timur pada tahun 2023:

Tabel 3 Data Kebakaran setiap Kecamatan di Kota Jakarta Timur tahun 2023

Kecamatan	Total
Cakung	126
Cipayung	68
Ciracas	42
Duren Sawit	87
Jatinegara	42
Kramat Jati	64
Makasar	40
Matraman	23
Pasar Rebo	51
Pulogadung	51

Sumber: <https://pemadam.jakarta.go.id>, 2024

Pada tahun 2023, Kecamatan Cakung mencatat jumlah kebakaran tertinggi di Jakarta Timur dengan 126 kasus, diikuti oleh Duren Sawit (87 kasus) dan Cipayung (68 kasus), sementara Matraman memiliki kejadian terendah dengan 23 kasus. Tingginya angka kebakaran di beberapa kecamatan menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih besar, dipengaruhi oleh faktor seperti kepadatan permukiman, instalasi listrik tidak standar, dan rendahnya kesadaran pencegahan kebakaran. Di Cakung, masalah utama mencakup jarak bangunan yang rapat, atap yang saling menempel, terbatasnya fasilitas mitigasi, minimnya ruang terbuka, serta jalan lingkungan yang sempit sekitar 1 meter, yang menghambat akses pemadam kebakaran dan meningkatkan risiko kerugian besar.

Untuk mengatasi tingginya risiko kebakaran, Pemerintah DKI Jakarta menerapkan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, termasuk melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (RedKar) di tingkat Rukun Warga dan Kelurahan guna meningkatkan kesiapsiagaan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, karena dari 65 kelurahan di Jakarta Timur, baru 30 yang memiliki unit RedKar, dengan sekitar 30 anggota per kelurahan. Kecamatan Cakung, yang terdiri dari 84 RW di 7 kelurahan, telah mulai menerapkan SKKL sebagai langkah mitigasi risiko kebakaran. Berikut adalah tabel yang merangkum wilayah di Kecamatan Cakung yang telah mengimplementasikan SKKL:

Tabel 4 Kelurahan yang telah membentuk Redkar

Kelurahan	RW yang memiliki Redkar
Jatinegara	02, 05, 10, 11, 12, 13, 14
Pulogebang	02, 03, 04
Penggilingan	03, 05, 08, 14
Cakung Timur	05, 06, 10, 12

Sumber: (<https://m.beritajakarta.id/>)

Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung masih belum optimal, meskipun telah diterapkan di beberapa wilayah. Dari 84 Rukun Warga (RW) yang tersebar di 7 kelurahan, hanya sebagian RW di empat kelurahan yang telah membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (RedKar). Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang belum memiliki unit RedKar. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah, diharapkan tingkat kesiapsiagaan terhadap kebakaran di Kecamatan Cakung dapat lebih optimal, sehingga jumlah kejadian kebakaran dapat diminimalisir. Berdasarkan permasalahan tersebut, implementasi SKKL di Kecamatan Cakung masih dinilai belum sesuai dengan harapan yang tertuang dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan ini dalam upaya pencegahan kebakaran dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode ini mencakup pengumpulan informasi melalui interaksi mendalam dengan individu, terutama melalui wawancara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam penelitian ini, sumber data dihimpun dengan mengadopsi teknik yang mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta pendekatan triangulasi. "Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur, di mana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan pilihan jawaban yang seragam untuk setiap responden, sehingga tanggapan dapat dicatat secara konsisten. Dokumentasi merujuk pada pencatatan peristiwa masa lampau dalam bentuk catatan tertulis, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang khas, tidak hanya mengamati individu tetapi juga mencakup pengamatan terhadap berbagai objek lainnya. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menggabungkan ketiga teknik tersebut guna memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh." (Sugiyono, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur

Implementasi Kebijakan SKKL dalam upaya Pencegahan Kebakaran Dini pada Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Menurut (Grindle, 2017), "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of police*) dan lingkungan implementasi (*konteks of police*). " Dengan kata lain, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada substansi kebijakan itu sendiri serta bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan SKKL di Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan kebakaran dini dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan SKKL tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang diterapkan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat hambatan dalam aspek pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemadam kebakaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesenjangan kesiapan fasilitas di Kecamatan Cakung. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko kebakaran.

a. Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Salah satu manfaat utama dari implementasi kebijakan SKKL adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Melalui pelatihan penanganan kebakaran awal, masyarakat dibekali dengan keterampilan dasar dalam mencegah dan merespons kebakaran secara mandiri. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga memperluas wawasan masyarakat, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya langkah-langkah preventif, seperti tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan dan memastikan instalasi listrik yang aman di rumah. Selain itu, latihan rutin, termasuk simulasi kebakaran dan penyuluhan melalui metode woro-woro, semakin memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada warga tentang cara bertindak saat terjadi kebakaran, sehingga mengurangi risiko kepanikan dan kesalahan dalam penanganan insiden.

Implementasi kebijakan SKKL juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran di lingkungan masyarakat. Dengan adanya alat pemadam kebakaran ringan (APAR), *hydrant* lingkungan, serta sistem pemantauan dan peringatan dini, masyarakat memiliki akses terhadap peralatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kebakaran sebelum api menyebar luas. Pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik dan gas rumah tangga juga menjadi bagian dari kebijakan ini, guna memastikan bahwa potensi sumber kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada respons dari dinas pemadam kebakaran.

Selain meningkatkan kapasitas individu, kebijakan SKKL juga berkontribusi dalam membangun sistem tanggap darurat berbasis komunitas. Pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran memungkinkan warga untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana di Kecamatan Cakung. Kelompok ini bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam merespons kejadian kebakaran sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Keberadaan Redkar semakin memperkuat jaringan pertahanan terhadap kebakaran di lingkungan berbasis komunitas.

b. Derajat perubahan yang diinginkan

Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan perilaku masyarakat terhadap risiko kebakaran. Peningkatan partisipasi warga dalam sosialisasi dan pelatihan kebakaran menandakan adanya perubahan pola pikir yang lebih proaktif terhadap upaya mitigasi kebakaran. Masyarakat kini lebih memahami pentingnya langkah-langkah preventif, seperti pemeriksaan instalasi listrik dan gas, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran jika terjadi insiden. Perubahan ini terlihat dari peningkatan jumlah pemadaman mandiri yang dilakukan warga sebelum api berkembang menjadi kebakaran besar. Berdasarkan data tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 30% dalam pemadaman mandiri oleh masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kompetensi masyarakat dalam menangani kebakaran secara cepat dan tepat. Selain itu, semakin banyak warga yang tergabung dalam kelompok siaga kebakaran dan Redkar yang menandakan terbentuknya sistem ketahanan berbasis komunitas yang semakin kuat.

Namun, meskipun pencapaian ini cukup baik, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan SKKL agar dampaknya dapat lebih luas dan berkelanjutan. Peningkatan fasilitas proteksi kebakaran, seperti penyediaan *hydrant*, APAR, dan akses air bersih untuk pemadaman, menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan terhadap kebakaran. Selain itu, program pelatihan perlu lebih intensif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak, agar seluruh komunitas memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesiapsiagaan bencana kebakaran.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga perlu diperkuat guna memastikan keberlanjutan kebijakan ini. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan dan organisasi sosial untuk mendukung program edukasi, menyediakan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai, serta mendorong inovasi dalam sistem peringatan dini kebakaran berbasis teknologi. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, derajat perubahan yang diharapkan dalam implementasi SKKL tidak hanya terbatas pada peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga pada pembentukan budaya keselamatan yang berkelanjutan dan sistem mitigasi kebakaran yang lebih tangguh di tingkat Kecamatan.

c. Kedudukan pembuat kebijakan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) berperan dalam mendukung implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan, baik sebagai pembuat kebijakan maupun fasilitator di lapangan. Melalui instruksi dan Surat Edaran, Dinas Gulkarmat memastikan adanya pedoman yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Selain itu, instansi ini melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran untuk

mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus serta memastikan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini oleh masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan SKKL, Dinas Gulkarmat tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan material, tetapi juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dinas ini aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi kepada peserta SKKL, memberikan arah dan bimbingan mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran, serta pentingnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di Kecamatan Cakung. Hal ini juga mencakup pembentukan kelompok masyarakat yang dilatih untuk menjadi Redkar di setiap RT. Keberadaan Redkar merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat untuk lebih siaga dan tanggap dalam menghadapi bahaya kebakaran, serta menjadi garda terdepan dalam melakukan pemadaman kebakaran sebelum petugas pemadam tiba di lokasi.

d. (Siapa) pelaksana program

Dalam implementasi kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, petugas pemadam kebakaran memiliki peran sebagai pelaksana program. Tugas utama petugas pemadam kebakaran mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan dan sosialisasi pencegahan kebakaran, hingga koordinasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Petugas pemadam kebakaran bertanggung jawab untuk memberikan materi edukasi mengenai bahaya kebakaran kepada masyarakat di Kecamatan Cakung, dan melaksanakan pelatihan bagi peserta SKKL untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kebakaran secara dini.

Tugas petugas pemadam kebakaran ini tercantum dalam rencana kinerja yang telah ditetapkan bagi setiap petugas, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan pimpinan. Dalam konteks ini, petugas tidak hanya berperan sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai pembimbing dan fasilitator, yang memandu masyarakat dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan kebakaran.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat, terutama melalui Relawan Pemadam Kebakaran merupakan elemen yang sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan SKKL. Redkar berada di garis depan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Relawan ini tidak hanya membantu petugas pemadam kebakaran dalam koordinasi saat kebakaran terjadi, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya mengenai tindakan pencegahan kebakaran yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga.

Keberadaan Redkar memperkuat ketahanan kebakaran berbasis komunitas. Redkar memberikan bantuan dalam penanggulangan kebakaran dini, yang sangat berperan dalam mencegah kebakaran meluas dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dengan adanya Redkar, masyarakat memiliki kesiapan lebih cepat dalam mengatasi bahaya kebakaran, yang akhirnya dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Secara keseluruhan, baik petugas pemadam kebakaran maupun Relawan Pemadam Kebakaran memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung implementasi kebijakan SKKL di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur. Petugas menjalankan fungsi administratif dan operasional sesuai dengan rencana kerja, sementara Redkar sebagai masyarakat yang terlatih memberikan dukungan langsung di lapangan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mempercepat penanggulangan kebakaran sejak dini. Keberhasilan SKKL sangat bergantung pada sinergi antara petugas pemadam kebakaran dan masyarakat yang terlibat dalam program ini.

e. Sumber daya yang dihasilkan

Implementasi kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pencegahan kebakaran dini. Dari aspek sumber daya yang dihasilkan, kebijakan ini telah berfokus pada pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas pemadam

kebakaran, yang secara langsung mendukung efektivitas program SKKL. Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek teknis dalam penanggulangan kebakaran, tetapi juga penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahannya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran melalui kelompok masyarakat yang terlatih, seperti Redkar di tingkat RT.

Namun, meskipun pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas telah dilakukan, ada tantangan terkait keterbatasan SDM yang mempengaruhi cakupan pelatihan dan pendampingan yang dapat diberikan. Tidak semua petugas telah mengikuti Diklat PPL, yang merupakan pelatihan lanjutan yang sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan edukasi dan koordinasi dengan masyarakat. Selain itu, ada kebutuhan untuk pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh petugas dan relawan memiliki keterampilan terbaru dalam menghadapi risiko kebakaran.

Dari sisi fasilitas, meskipun beberapa sarana dan prasarana proteksi kebakaran telah disediakan, seperti alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan lainnya, masih terdapat kekurangan dalam jumlah dan kualitas fasilitas yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan dan peningkatan fasilitas menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan SKKL secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam menyediakan peralatan yang lebih lengkap serta memastikan bahwa infrastruktur pendukung kebakaran, seperti pos pemadam dan alat pelindung diri, tersedia secara merata di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, tantangan utama dalam implementasi kebijakan SKKL adalah peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta penguatan sistem koordinasi antara petugas, relawan, dan masyarakat. Jika aspek-aspek ini dapat diperbaiki, maka kebijakan SKKL akan semakin efektif dalam mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur.

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan kebakaran dini. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap harta, jiwa, dan raga menghambat upaya pencegahan yang proaktif. Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, seperti minimnya fasilitas pemadam kebakaran dan kurangnya alat pemadam api mandiri, mengurangi efektivitas program. Tingkat keterlibatan masyarakat juga terkendala oleh kesibukan pekerjaan, yang membatasi partisipasi mereka dalam pelatihan maupun respons darurat. Selain itu, penyebaran informasi dan edukasi mengenai bahaya kebakaran masih belum optimal, menyebabkan masyarakat kurang memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan awal yang efektif. Dengan demikian, meskipun SKKL telah memberikan dampak positif, hambatan seperti kesadaran yang masih rendah, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi yang minim perlu diatasi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal.

3. Upaya dalam Implementasi Kebijakan SKKL

Berdasarkan hasil wawancara, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran. Langkah utama yang diterapkan adalah sosialisasi dan edukasi kebakaran secara berkelanjutan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai bahaya kebakaran dan langkah penanganannya. Selain itu, pemetaan kebutuhan dilakukan dengan mendata potensi risiko di setiap wilayah serta mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman dini agar respons terhadap kebakaran lebih cepat dan efektif. Pelatihan langsung di tingkat komunitas juga diadakan untuk membekali warga dengan keterampilan dalam menangani kebakaran awal sebelum petugas tiba. Edukasi kebakaran yang dilakukan secara konsisten bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan dalam masyarakat. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan implementasi SKKL dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat lebih mandiri dalam mencegah dan menangani kebakaran di Kecamatan Cakung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan dalam upaya pencegahan kebakaran dini di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Ditinjau dari beberapa aspek Implementasi kebijakan yang meliputi jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan. Kebijakan ini memberikan manfaat penting bagi masyarakat, termasuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pencegahan kebakaran melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan sarana pemadam kebakaran. Namun, meskipun ada perubahan positif dalam perilaku masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam pelatihan dan pemadaman mandiri, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta perbaikan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, akan memperkuat ketahanan kebakaran berbasis komunitas. Peran Dinas Gulkarmat sebagai pembuat kebijakan, pelaksana program, dan penyedia dukungan sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan SKKL berjalan efektif, namun tantangan terkait SDM dan fasilitas yang terbatas perlu segera diatasi untuk memaksimalkan dampak kebijakan ini.
2. Implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan anggaran. Kurangnya jumlah dan kualitas petugas serta relawan, terutama yang belum mengikuti pelatihan lanjutan, membatasi kemampuan mereka dalam melaksanakan sosialisasi dan penanggulangan kebakaran. Selain itu, fasilitas kebakaran yang tersedia masih kurang merata dan memadai, beberapa wilayah rawan kebakaran yang belum dilengkapi dengan sarana yang cukup. Koordinasi yang kurang optimal antar lembaga serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan, yang diperburuk oleh keterbatasan anggaran untuk mendukung pengadaan peralatan dan pelatihan yang diperlukan.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Kebijakan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur meliputi penguatan SDM melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan fasilitas penanggulangan kebakaran, pengoptimalan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini, serta peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur disarankan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran, termasuk pelatihan lanjutan seperti Diklat PPL, untuk memperkuat keterampilan petugas dalam edukasi masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
2. Kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran dan sumber daya yang ada, dengan fokus pada pengadaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM.
3. Kepada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur disarankan untuk melakukan pengembangan fasilitas kebakaran yang lebih baik, serta peningkatan perlengkapan untuk petugas dan Redkar, harus menjadi prioritas agar dapat mendukung penanggulangan kebakaran secara cepat dan efektif.
4. Kepada Masyarakat di Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program sosialisasi dan pelatihan kebakaran yang diselenggarakan oleh

pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Q., Lestari, F., & Wardani, D. P. (2022). Analysis of Fire Risk Assessment in South Jakarta 2021. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 26-38. doi:<https://doi.org/10.26553/jikm.2022.13.1.26-38>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Liao, Q., Hu, L., Zhu, H., Xie, L., Li, B., & Qu, B. (2024). Fire prevention and extinguishing technologies in coal spontaneous combustion: a bibliometric and systematic review. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 149, 12609-12633. doi:<https://doi.org/10.1007/s10973-024-13755-8>
- Rahmat, A., Prianto, E., & Sasongko, S. B. (2019). Studi Evaluasi Model Bentuk Atap Dan Fenomena Kebakaran Penyebab Listrik Pada Rumah Tinggal Menengah Ke Bawah Di Pemukiman Padat. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 1(2), 112-122. doi:<http://10.0.68.101/jaz.v1i2.13560>
- Ruswandi, D. (2023). *Tata Kelola Kolaboratif: Solusi Ketahanan Hutan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Revisi 2020*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.